

# PENDIDIKAN TINGGI DAN PROSPEK PEREKONOMIAN NASIONAL DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Seminar Nasional Badan Keahlian DPR  
"Prospek Perekonomian Nasional dan Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2024  
Di tengah Ketidakpastian Global." Hotel Borobudur, Jakarta 26-28 Januari 2023

Oleh: Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd, M.A.  
(Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)

## 1. Latar Belakang

Di akhir masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 menguat dan diperkirakan dapat mencapai pertumbuhan rata-rata 5,2-5,3%. Pertumbuhan yang lebih tinggi sejak masa pra-pandemi itu antara lain ditandai dengan: inflasi yang cukup rendah karena Indonesia berhasil menjaga harga pangan yang tetap stabil dan berkontribusi terhadap inflasi yang relatif rendah; adanya momentum pemulihan ekonomi di Kuartal-3 (5,72%) Kuartal-4 (5%); investasi yang masuk mulai berdampak positif; ekspor yang tetap tinggi dengan neraca perdagangan yang surplus selama 31 bulan terakhir; serta impor yang sudah pulih kembali untuk mendukung industri manufaktur (Menkeu, 2023).

Secara umum dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pemulihan di seluruh sektor pada tahun 2022. Sektor-sektor yang terkena Covid-19 seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman yang berkontraksi 10% hingga 15%, sekarang sudah tumbuh positif, yaitu sektor transportasi tumbuh hingga 21%; akomodasi, makanan, dan minuman yang tumbuh 11,3%, dan sektor-sektor lainnya yang juga tumbuh positif; semua itu telah memacu PDB Indonesia hingga mencatat 6.6% di atas PDB pra-pandemi (2019). Di antara indikator yang mendorong pertumbuhan adalah peran APBN dalam menstabilkan perekonomian Indonesia dari berbagai guncangan global. Managing Director IMF bahkan mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang dari kegelapan ekonomi dunia (the bright sight in the dark) karena perekonomiannya memiliki resiliensi selama penanganan pandemi yang diharapkan masih tetap menguat pada tahun 2023.

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2023. Meskipun perekonomian dunia dilanda ketidakpastian, ekonomi Indonesia tetap dikelola secara optimistis, waspada, dan antisipatif. Pemerintah menerapkan 4 strategi jangka pendek agar kinerja ekonomi tetap kuat di tahun 2023, yaitu:

1. Hilirisasi; antisipasi pengaruh geopolitik dan gejolak ekonomi global, kinerja sektor manufaktur harus tetap dijaga, yaitu dengan: memelihara demand, melanjutkan hilirisasi, serta pengembangan ekosistem sektor manufaktur, didukung oleh penerbitan perppu cipta kerja. Purchasing managers index (PMI) manufaktur

Indonesia masih berada di level ekspansif, yakni mencapai 50,9 di Desember 2022 yang menunjukkan adanya kenaikan sejak November 2022.

2. Sektor riil, pemerintah meningkatkan kinerja industri berorientasi ekspor yang semakin berdaya saing, yang saat ini dimulai dari tiga primadona ekspor Indonesia yakni nikel, kelapa sawit dan turunannya, serta batu bara.
3. Pengendalian valas, Pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi periode menahan valas dan menerapkan sanksi devisa hasil ekspor yang dilarikan ke luar negeri untuk memperkuat cadangan devisa agar dapat memperkuat kurs rupiah
4. Larangan ekspor bahan mentah, pemerintah menetapkan kebijakan larangan ekspor sektor mineral (Nikel, bauksit, tembaga, dsb.), pertanian, perikanan, dsb., dalam rangka meningkatkan nilai tambah (Menkeu, 2023).

Keempat strategi itu dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan berbasis kekayaan sumberdaya alam (SDA). Indonesia masih dalam kategori *resources-based economy*, namun pemerintah mulai melakukan hilirisasi beberapa sektor melalui intervensi teknologi dalam pengolahan SDA agar dapat mengungkit nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Masalahnya, hilirisasi itu masih bergantung pada impor modal dan tenaga ahli sehingga memunculkan beberapa tantangan penting untuk kemajuan perekonomian berkelanjutan di masa depan. Tantangan yang paling utama adalah, penguatan SDM Indonesia dalam penguasaan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta memacu riset dan inovasi untuk mengolah SDA dengan kekuatan sendiri untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

## **2. Pendidikan Tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam pidatonya setelah terpilih menjadi Presiden RI periode kedua, tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Indonesia Maju: "... *the aim is to develop an adaptive, productive, innovative, and competitive Indonesia that will make Indonesia one of the strongest countries in the world, highlighting that the key to this more prosperous future is developing human resources.* (State Address, August 2019 dalam The World Bank, 2019). Ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM Indonesia yang bermutu menempati prioritas yang tertinggi sejalan dengan prioritas pembangunan industri di berbagai bidang, melalui pendidikan di sekolah, pendidikan vokasi dan profesi, pelatihan industri dan pendidikan tinggi.

Sampai saat ini, pendidikan tinggi di Indonesia belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mendorong keunggulan dan daya saing bangsa di era disrupsi global. Menurut laporan QS WUR 2022 perguruan tinggi (PT) Indonesia yang menempati 500 terbaik dunia hanya UGM (urutan 254), Universitas Indonesia (290), ITB (303) dan Universitas Airlangga (465). Bahkan dalam daftar 25 PT terbaik Asia versi QS WUR 2022, tidak ada satupun PT Indonesia (QS WUR, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan keunggulan dan daya saing Pendidikan tinggi Indonesia belum signifikan hasilnya.

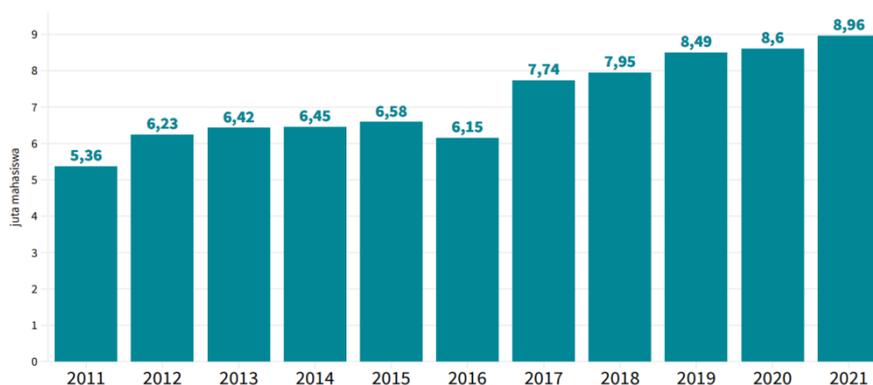
Indeks persaingan global (IPG) Indonesia yang cenderung naik-turun dalam lima tahun terakhir, yaitu: naik tajam dari 43 (2018) ke 32 (2019), menurun ke 40 dari 134 negara

(2020), naik lagi menjadi ke-37 (2021) dan akhirnya menurun ke 44 dari 144 negara (2022), sangat kontras dengan IPG yang relatif stabil pada peer group Asia-Pacific, peringkat 11-12 (IMD, 2022). Naik-turunnya IPG dalam waktu yang singkat ini ditentukan oleh indeks pendidikan tinggi yang masih cukup rendah, di antara indeks-indeks lainnya, yakni: kesiapan teknologi (3.25) dan inovasi (3.71) (Xavier Sala-I-Martin *et al*, 2013). Rendahnya indeks pendidikan tinggi ini ditengarai oleh pola pengembangan pendidikan tinggi yang belum stabil dan sistemik di umumnya negara berkembang (Oberman *et al*, 2012), termasuk Indonesia.

Pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor pendorong kunci (*key drivers*) pertumbuhan kinerja ekonomi, kesejahteraan, dan daya saing antar-negara. Universitas bukan hanya memberikan layanan pendidikan tinggi serta pelatihan kompetensi pekerja terdidik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang dapat memacu tumbuhnya riset untuk mendorong inovasi yang memiliki nilai komersil (Edwards, C. dan McCluskey, N, 2019). Pendidikan tinggi Indonesia berkembang sangat pesat dengan jumlah mahasiswa yang terus meningkat 67,2% dalam 10 tahun terakhir. Proporsi jumlah mahasiswa PTS jauh lebih besar, 60,3%, ketimbang mahasiswa PTN, 39,7% (Gambar 1). Masyarakat memang telah memberikan sumbangan yang lebih besar dalam penyediaan PTS dibanding pemerintah dalam penyediaan PTN di tanah air, walaupun arah pengembangan itu cenderung *arbitrary*, berbeda dengan prioritas kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri berteknologi tinggi yang didukung oleh penguatan pendidikan Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics (STEAM).

Riset menunjukkan, perluasan Pendidikan tinggi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Studi Maneejuk and Yamaka (2021) yang berjudul: Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di lima Negara Asean, menemukan bahwa perluasan pendidikan tinggi memberikan dampak *non-linear* terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, namun tetap menunjukkan berlakunya *the law of diminishing returns*; perluasan tersebut terbatas hingga pada titik jenuh tertentu, sesuai dengan bidang-bidang keahlian yang mungkin masih dibutuhkan atau tidak dibutuhkan lagi oleh lapangan kerja industri.

Gambar 1  
Perkembangan Jumlah Mahasiswa di Indonesia, 2011-2021



Sumber: Susenas (BPS, 2021)

Dalam analisis regionalnya, Maneejuk and Yamaka (2021) menunjukkan bahwa dampak pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dua kali lipat lebih kuat jika mencapai prakondisi tertentu. Prakondisi tersebut, yaitu: (1) perluasan pendidikan tinggi yang diimbangi dengan kualitas mahasiswa yang masuk (*quality of intake*), dan (2) perimbangan jumlah mahasiswa menurut bidang keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri (Maneejuk et al, 2021; McCluskey, 2019).

**Pertama**, mutu pendidikan menengah Indonesia masih cukup memprihatinkan antara lain dapat dilihat dari pengukuran oleh Program of International Student Achievement (PISA) dalam 20 tahun terakhir. Selama itu, Indonesia belum memanfaatkan hasil dan data PISA sebagai dasar untuk memperbaiki mutu pendidikan menengah. Skor yang diraih anak Indonesia dalam literasi Sains, Matematik, dan Membaca selama periode 2012-2018 sungguh memilukan. Setiap tiga tahun sejak 2001, anak-anak Indonesia mengikuti uji PISA yang menurut Pisani (2013) disebut sebagai sebuah ritual yang memalukan (*embarrassing ritual*). Skor PISA dalam literasi matematik, sains dan membaca para siswa pendidikan menengah Indonesia, bukan hanya rendah tetapi juga fluktuatif sejak tahun 2001-2009 dan konsisten menurun sejak 2012 hingga sekarang (OECD, 2018).

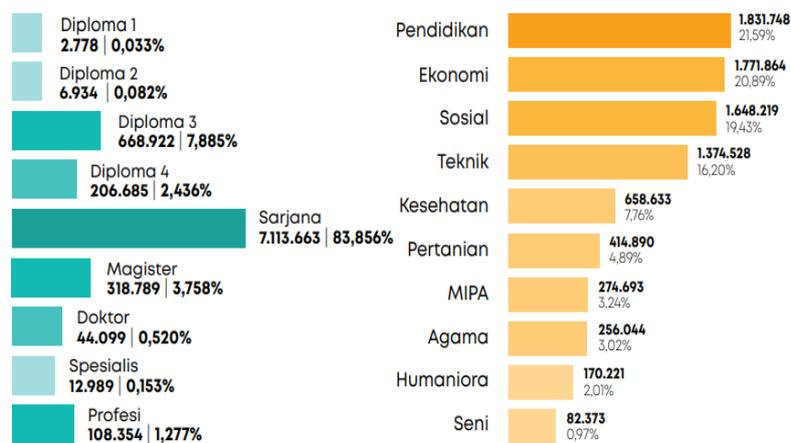
Jika kualitas lulusan pendidikan menengah itu rendah, maka kualitas mahasiswa yang masuk PT (*student intake*) juga rendah sehingga wajarlah jika keunggulan pendidikan tinggi Indonesia masih menjadi tantangan yang cukup besar bagi Indonesia. Kelemahan literasi lulusan pendidikan itu masih diperburuk lagi dengan kurangnya perhatian dalam pengembangan literasi di PT, termasuk literasi bahasa Inggris. Sikap negara tetangga kita, seperti Vietnam, terhadap bahasa Inggris jelas, yaitu menjadikannya sebagai bahasa asing utama yang mutlak dimiliki untuk dapat menguasai ipteks dan belajar sepanjang hayat. tetapi di Indonesia bahasa Inggris sering dianggap sebagai “musuh” bersama karena dianggap menyaingi bahasa nasional. Ini yang harus diluruskan; karena literasi bahasa nasional dan bahasa asing harus dikembangkan secara seimbang.

Dampak enrolmen pendidikan menengah positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika lulusannya berkualitas sehingga akan menjadi *intake* mahasiswa PT yang bermutu. Kualitas lulusan pendidikan menengah sangat menentukan terhadap PT yang unggul dan bermutu, karena pendidikan tinggi adalah kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan (Maneejuk, and Yamaka, 2021). Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menengah, khususnya dalam penguatan literasi, seharusnya merupakan bagian yang integral dengan upaya peningkatan keunggulan dan daya saing global universitas di Indonesia.

**Kedua**, perluasan pendidikan tinggi menurut bidang keahlian tidak boleh sembarang (*arbitrary*) tetapi harus dilakukan dalam suatu pola yang sistemik hanya pada bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan industri berteknologi tinggi. Namun, kenyataan berbicara lain, hingga saat ini perluasan pendidikan tinggi baru dapat menghasilkan banyaknya jumlah mahasiswa hingga mencapai hampir 9 juta (2021), namun perluasannya bergerak kearah yang kurang mendukung penguatan pendidikan STEAM.

Akibatnya, program pendidikan Teknik dan MIPA terkait dengan *engineering* kurang berkembang dan belum mampu menghasilkan tenaga perancang dan pelaksana industri secara langsung. Program Pendidikan Teknik dan MIPA hanya menampung mahasiswa sekitar 1,65 juta (18,4%) mahasiswa, sisanya tersebar pada prodi sosial-perilaku, ekonomi, kependidikan, dan humaniora. Di samping jumlahnya kecil, rata-rata mutu lulusan sarjana Teknik dan MIPA juga masih menjadi tantangan yang cukup besar untuk menghasilkan tenaga insinyur yang kompeten di tanah air.

Gambar 2:  
Jumlah Mahasiswa Terdaftar Berdasarkan Program Pendidikan dan Kelompok Bidang Ilmu, 2021



Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti, 2021)

Mahasiswa kependidikan paling besar dan ditengarai *over-supplied*, sehingga perluasan prodi-prodi kependidikan harus dikendalikan dan diarahkan untuk tidak menghasilkan guru dalam jumlah besar; guru memang dibutuhkan tetapi hanya untuk mengganti mereka yang pensiun setiap tahunnya. Oleh karena itu program perluasan prodi guru harus dikaji ulang; yang terpenting bukan jumlahnya tetapi kualitas dan relevansi guru yang dihasilkan oleh LPTK. Agar dapat menghasilkan guru yang profesional dan relevan dengan profesi mengajarnya, maka perbaikan mendasar perlu dilakukan terhadap program Pendidikan profesi guru (PPG) yang saat ini dilaksanakan di setiap LPTK.

Profil perluasan pendidikan tinggi di Indonesia yang kurang relevan dengan kebutuhan industri juga melahirkan pengangguran sarjana yang cukup tinggi. Menurut Gambar-, semakin tinggi pendidikan semakin tinggi angka pengangguran; penganggur yang berpendidikan rendah (2022) sangat kecil (0,5% TPS, 2,5% TTSD, dan 2,6% tamat SD), sedangkan angka pengangguran lulusan PT justru lebih tinggi (4%). Gejala ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih didominasi oleh kegiatan subsistensi yang belum memerlukan pekerja berpendidikan tinggi, tetapi cukup dengan memperkerjakan tamatan SD, bahkan tidak sekolah, sehingga produktivitasnya rendah dan tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

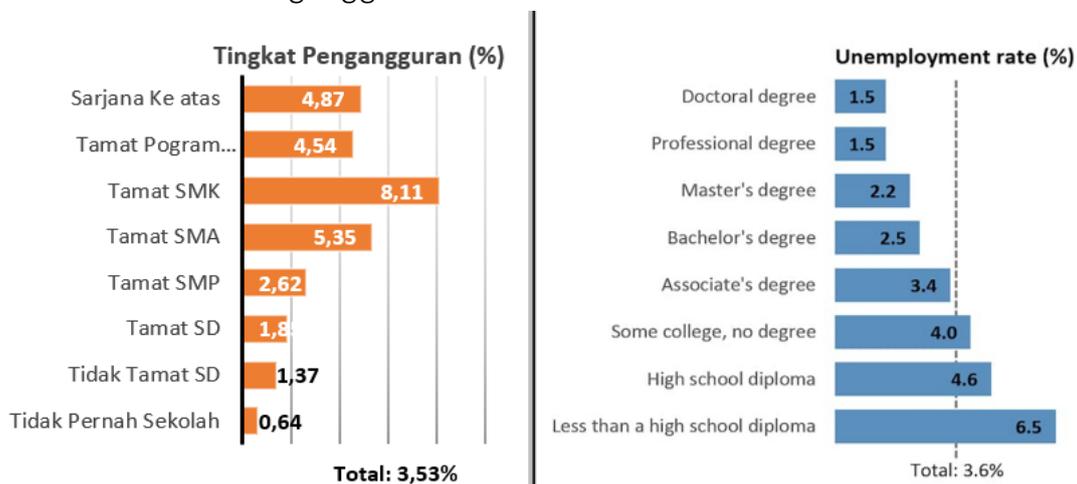
Tabel 1: Angka Pengangguran Nasional menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Indonesia, 2005-2022

No	Pendidikan Angkatan Kerja	Angka Pengangguran Nasional (%)				
		2005	2019	2020	2021	2022
1	Tidak Pernah Sekolah (TPS)	5,4	0,6	1,0	1,0	0,5
2	Tidak Tamat SD (TTSD)	5,6	1,4	2,0	1,8	2,5
3	Tamat SD	7,1	1,8	2,7	2,8	2,6
4	Tamat SMP	14,2	2,6	3,7	3,7	3,4
5	Tamat SMA	20,4	5,4	6,6	6,1	5,9
6	Tamat SMK	18,9	8,1	10,4	8,5	7,3
7	Tamat Pogram Diploma	12,3	4,5	6,1	4,5	3,5
8	Sarjana Keatas	11,6	4,9	6,2	5,0	4,0
<b>Total</b>		11,2	3,53	4,8	4,4	4,0

Sumber: Sakernas, BPS (beberapa tahun)

Pengangguran lulusan SMA dan SMK adalah tertinggi (5,9% dan 7,3%), sebanyak 4,1 juta, hampir setengahnya (49,1%) jumlah penganggur seluruhnya, 8,4 juta. Jika SMA dan SMK dijadikan program pendidikan wajib dan lulusannya tidak langsung dapat bekerja, jumlah pengangguran terdidik Indonesia akan terkoreksi sebesar 49,1%, atau sekitar 4,3 juta. SMK menghasilkan angka pengangguran tertinggi secara konsisten dalam 4 tahun terakhir, karena siswa SMK terlalu dini jika diarahkan untuk menjadi pekerja yang *specialized*. Jika menjadi pendidikan wajib, SMK bukan merupakan pendidikan terminal, tetapi merupakan pendidikan pra-vokasi yang harus melanjutkan ke pendidikan tinggi vokasi.

Gambar-3: Profil Pengangguran di Indonesia dan Amerika Serikat Tahun 2017



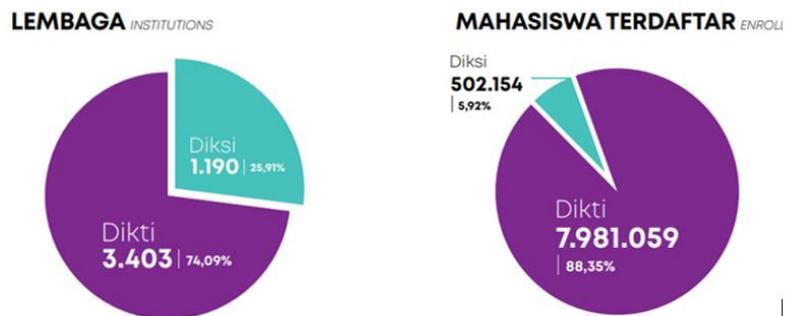
Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi (2021) dan McCluskey (2019)

Profile pengangguran terdidik di Indonesia berbeda dengan di Amerika Serikat (AS); di Indonesia, semakin tinggi pendidikan semakin tinggi angka pengangguran, sedangkan di Amerika Serikat menunjukkan kondisi sebaliknya, semakin tinggi pendidikan semakin kecil penganggurannya (Gambar-3). Gejala ini dapat dibaca paling tidak dalam tiga cara, yaitu: **Pertama**, berbeda dengan di Indonesia, struktur ekonomi AS yang dominan sektor modern (*industry*) membutuhkan lebih banyak pekerja berpendidikan tinggi. **Kedua** kualitas lulusan di AS umumnya kompeten dan relevan dengan kebutuhan industri.

Sebaliknya di Indonesia, perluasan pendidikan justru lebih mengutamakan pertambahan jumlah enrolmen ketimbang mutu pembelajaran dan mutu kompetensi lulusan. *Ketiga*, mahasiswa program pendidikan vokasi di AS cukup besar jumlahnya bahkan mahasiswa vokasi yang lebih aplikatif dan *employable* lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan program sarjana akademik.

Di Indonesia sebaliknya, Gambar-4 menunjukkan bahwa jumlah program pendidikan akademik jauh lebih besar (74,1%) ketimbang prodi pendidikan vokasi (25,9%). Lebih buruk lagi, jumlah mahasiswa prodi vokasi (Diksi) jauh lebih kecil lagi (11,6%) dibandingkan dengan jumlah mahasiswa sarjana akademik (88,4%). Ini berarti bahwa mahasiswa Indonesia jauh lebih banyak dipersiapkan untuk menjadi sarjana ilmu pengetahuan (akademik) ketimbang untuk menjadi pekerja yang kompeten dan profesional sesuai dengan kebutuhan industri.

Gambar-4: Jumlah Institusi dan Mahasiswa Terdaftar Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Tinggi Vokasi, Tahun 2021



Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi (2021)

Gejala-gejala tersebut di atas bukan masalah yang unik Indonesia, tetapi terjadi pada hampir semua negara berkembang. Masalahnya bukan terletak pada kualitas aktor-aktor pengajar dan peneliti Indonesia, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas kebijakan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Tatakelola pendidikan tinggi di Indonesia bukan hanya tertinggal dari AS atau Eropa, tetapi juga tertinggal dari beberapa negara Asia, seperti China, Malaysia, atau Thailand. Mereka telah mengelola PT melalui pendekatan korporatif jauh lebih lama dan dapat mewujudkan tatakelola yang jauh lebih efisien ketimbang Indonesia. Inilah tantangan Indonesia berikutnya.

### 3. Mengelola PT dalam Era Pesaingan Antar-Universitas di Dunia

Universitas di Indonesia (terutama PTN) menghadapi kendala struktural dalam peningkatan mutu dan keunggulan layanan pendidikan tinggi, karena masih tergantung pada APBN yang jumlahnya terbatas. Untuk mengatasi biaya tatakelola yang semakin tinggi, PT Indonesia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menaikkan uang kuliah. Kenaikan uang kuliah itu sendiri tidak mudah karena, menurut pengalaman PT-BHMN, penetapan uang kuliah yang terlalu besar menimbulkan ketidakadilan akses; hanya mahasiswa kaya yang lebih mudah untuk mengakses universitas terbaik. Sementara itu, mahasiswa miskin

hanya dapat memilih salah satu dari jauh lebih banyak PTS yang rendah kualitasnya, sehingga kurang kompetitif dalam mengakses lapangan kerja terbaik setelah lulus. Dalam perkembangan saat ini, menaikkan uang kuliah juga dibatasi oleh kebijakan negara, yaitu uang kuliah tunggal (UKT). Masalah inilah yang menyebabkan beberapa bagian masyarakat menolak kebijakan korporatisasi manajemen PT yang dipersepsikan sebagai telah menimbulkan ketidakadilan. Itulah sebabnya maka undang-undang BHP dan PT BHMN dianulir oleh MK dan dikoreksi oleh pemerintah menjadi PTN-bh.

Korporatisasi manajemen PT tidak datang dengan sendirinya, tetapi merupakan salah satu bentuk terapan dari konsep *higher education as industry* (Edwards, 2004). Konsep pendidikan tinggi sebagai industri telah digunakan lama di banyak negara maju, yaitu negara-negara yang mampu menempatkan universitas mereka pada papan atas dunia. Day *et al*(2012) misalnya mengatakan bahwa universitas di negara-negara maju memiliki derajat otonomi yang tinggi, dengan intervensi birokrasi pemerintah yang seminimal mungkin. *Public universities* di AS, Australia dan Eropa telah beroperasi sebagai *corporate-like institutions* dan memungkinkan mereka meningkatkan profesionalitas, memperkuat hubungan industri, serta meningkatkan daya saing secara global (Edwards, 2004). Keadaan inilah yang diinginkan oleh Kemdikbud melalui penerapan kebijakan MBKM pada seluruh PT Indonesia.

Namun, Indonesia menghadapi masalah mendasar dalam penerapan korporatisasi tatakelola PT. Sebagian pemegang kebijakan dan masyarakat Indonesia masih memandang pendidikan tinggi sebagai *social goods* daripada *industrial goods*. Mereka belum yakin bahwa universitas bisa bertransformasi menuju institusi korporatif sehingga menghasilkan profit. Profit yang diperoleh PT itu sendiri sebaiknya tidak dipandang konsep yang tabu, karena sejumlah universitas ternama di dunia sudah lama bertransformasi sebagai korporat dan menghasilkan profit finansial yang besar. Dalam konsep nir-laba, profit yang dihasilkan oleh PT tidak sepatutnya digunakan untuk memperkaya seseorang atau kelompok orang, tetapi untuk memperkuat mutu layanan universitas sehingga pada gilirannya akan menarik mahasiswa nasional dan internasional terbaik untuk mendaftar.

*Mindset* yang kini berkembang justru bertentangan dengan fakta yang terjadi bahwa keluarga-keluarga kaya di seluruh dunia justru memutuskan untuk mengirimkan anaknya ke universitas yang paling kompetitif, tidak peduli berapapun mereka harus membayar (Weisbrod et al., 2008). Pada tahun 2016, misalnya, jumlah mahasiswa anak orang kaya dari Indonesia yang terbang ke Australia dan Malaysia jauh lebih banyak ketimbang sebaliknya; mereka lebih didorong oleh alasan untuk memperoleh universitas dengan kualitas layanan terbaik dan bukan yang murah harganya (MOHE, 2016). Jika universitas di Indonesia sudah unggul dan bermutu, maka bukan hanya akan menjadi substitusi impor, tetapi akan mengundang mahasiswa LN terbaik dan mendatangkan devisa.

Korporatisasi manajemen pendidikan tinggi merupakan salah satu tatakelola terbaik yang mampu menjadikan universitas di banyak negara maju secara profesional kompetitif dan menghasilkan profit finansial. Beberapa universitas swasta di Indonesia

telah mulai mengelola dirinya secara korporatif melalui upaya keras dan mahal dalam perbaikan mutu layanan dengan harapan dapat menarik mahasiswa internasional. Hal ini setidaknya terjadi pada beberapa universitas swasta di Indonesia, seperti Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang telah mampu mengundang lebih dari 500 mahasiswa asing dari 22 negara (UMM, 2013), dan Universitas Bina Nusantara. Oleh karena itu, beberapa PTS Indonesia yang telah memiliki keunggulan program internasionalnya sebaiknya didukung secara finansial, institusional dan perlindungan oleh pemerintah, seperti halnya diberikan kepada PTN.

Dari aspek keadilan, tatakelola universitas yang masih kental dengan campur tangan birokrasi pemerintahan, justru semakin memperdalam ketidakadilan bagi masyarakat bawah. Sebagian besar PTS yang menawarkan mutu layanan yang relatif rendah, justru harus menarik uang kuliah yang lebih mahal. Masalah ini unik di negara berkembang, seperti Schultz (2004) menemukan bahwa “ketidakadilan karena besarnya subsidi negara untuk universitas negeri di Afrika telah menimbulkan masalah karena telah menyerap anggaran pemerintah per-mahasiswa yang sangat besar. Namun subsidi tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh mahasiswa dari keluarga kaya.” Masalah ini dalam derajat tertentu terjadi juga di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Unifah Rosyidi, (2018) bahwa PTN yang lebih menguntungkan mahasiswa dari keluarga mampu menunjukkan bahwa model tatakelola keuangan pendidikan tinggi di masa lalu yang sebagian masih terasa saat ini cenderung mensubsidi keluarga kaya dan memajaki keluarga miskin. Ketidakadilan inilah yang telah menjadi sumber ketidakadilan dalam layanan pendidikan tinggi di negara berkembang, yang berkontribusi sangat besar terhadap rendahnya mutu dan daya saing rata-rata universitas di negara-negara tersebut.

Terhadap isu bahwa PTN menguntungkan orang kaya sudah lama dicoba diantisipasi oleh pemerintah. Untuk pemerataan akses, pada waktu pendaftaran masuk PTN terdapat subsidi untuk calon mahasiswa yang kurang mampu, diwajibkannya UKT rendah bahkan ada pembebasan UKT bagi mahasiswa yang tak mampu serta KIP-Kuliah. Upaya ini sudah cukup baik untuk pemerataan akses, namun kita masih dihadapkan pada masalah pemerataan kualitas. Untuk Di sisi lain, untuk mengejar kualitas WCU, PTN-bh membutuhkan biayanya yang sangat besar, tanpa subsidi pemerintah besar-besaran agak sulit bagi PTN untuk mengejar WCU, salah satunya adalah memerlukan dosen asing, mahasiswa asing, perlu inbound dan outbound yang membutuhkan biaya tinggi serta perlu atmosfer akademik yang didorong oleh riset, inovasi dan students and lecturers' mobility. Oleh karena itu Subsidi pemerintah untuk PTN-bh sebaiknya jangan dikurangi bahkan mungkin perlu ditambah agar PTN-bh cepat menguat. Anggaran pemerintah untuk PTN-bh tersebut bukan berfungsi sebagai subsidi tetapi sebagai penyertaan modal pemerintah di PTN.

#### **4. Kesimpulan dan Implikasinya**

Strategi hilirisasi melalui intervensi teknologi pengolahan sumberdaya alam (SDA) dengan nilai tambah yang tinggi berhasil menjaga ekonomi makro yang kuat dan

memacu pertumbuhan. Namun, hilirisasi yang masih bergantung pada impor modal dan tenaga ahli telah menimbulkan tantangan penting untuk mewujudkan perekonomian maju pada tahun 2045. Tantangan yang paling besar adalah membangun perguruan tinggi (PT) yang unggul, berdayasaing seta dapat melahirkan SDM yang kompeten, profesional dan inovatif dalam pengolahan semua potensi SDA Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perluasan pendidikan tinggi Indonesia berlangsung sangat pesat dengan jumlah mahasiswa yang meningkat 67,2% dalam 10 tahun terakhir; dua-pertiganya adalah mahasiswa PTS (60,3%) dan sisanya (40%) adalah mahasiswa PTN. Melalui perguruan swasta masyarakat telah memberikan sumbangan besar dalam penyediaan PTS, walaupun arah perluasannya lebih banyak terjadi pada prodi-prodi di luar yang diprioritaskan, yaitu STEAM yang dapat memacu pengembangan industri berteknologi tinggi.

Dampak pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terbukti signifikan dari banyak studi di banyak negara. Dampaknya bisa dua kali lebih kuat jika PT tersebut unggul dan berdayasaing, yaitu dapat mendidik mahasiswa bidang STEAM dengan jumlah dan mutu yang sesuai kebutuhan industri berteknologi tinggi, serta didukung oleh lulusan pendidikan menengah yang berkualitas. Faktanya di Indonesia, kedua prakondisi itu belum terpenuhi sehingga peranan PT dalam melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang kompeten belum optimal. Oleh karena itu peningkatan jumlah dan mutu lulusan sarjana bidang STEAM dengan kemampuan literasi yang tinggi adalah penting untuk menghasilkan pelaku-pelaku yang kompeten dalam pengembangan industri berteknologi tinggi. Di samping itu, penguatan literasi lulusan pendidikan menengah tidak dapat dipisahkan dari program peningkatan keunggulan dan dayaasaing universitas di Indonesia di pentas global

Profile perluasan pendidikan tinggi bukan hanya kurang relevan dengan kebutuhan industri, tetapi juga melahirkan angka pengangguran sarjana yang tinggi yang bahkan jauh lebih tinggi ketimbang angka pengangguran lulusan SD ke bawah. Ini menunjukkan perekonomian Indonesia yang masih dominan kegiatan ekonomi tradisional (*subsistent*) cukup hanya memperkerjakan tamatan SD atau lebih rendah, sehingga produktivitasnya rendah dan tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Angka pengangguran lulusan SMA-SMK tertinggi dengan jumlah yang hampir separuh (49,1%) dari jumlah penganggur seluruhnya (8,4 juta). Masalah ini terjadi karena spesialisasi pekerjaan yang terlalu dini, padahal jenis pekerjaan untuk lulusan SMK belum perlu dispesialisasikan. Jika SMA/SMK dijadikan sebagai pendidikan wajib, maka lulusannya tidak masuk kategori angkatan kerja atau penganggur, sehingga jumlah penganggur nasional otomatis terkoreksi hampir setengahnya. Sebagai pendidikan wajib, SMK bukan merupakan pendidikan terminal tetapi pendidikan pra-vokasi yang harus melanjutkan ke pendidikan tinggi vokasi.

Di Indonesia jumlah program pendidikan akademik adalah tiga per-empatnya, dan prodi pendidikan vokasi seperempatnya. Jumlah mahasiswa vokasi juga jauh lebih kecil

ketimbang mahasiswa sarjana akademik (11,6% < 88,4%). Ini menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia jauh lebih banyak dipersiapkan untuk menjadi sarjana ilmu pengetahuan ketimbang menjadi calon pekerja yang kompeten dan profesional yang sangat dibutuhkan industri. Oleh karena itu perluasan program vokasi adalah penting untuk memacu produktivitas lulusannya.

Rendahnya keunggulan dan daya saing PT bukan masalah yang unik Indonesia, tetapi terjadi di hampir semua negara berkembang. Masalahnya bukan terletak pada kualitas dosen dan peneliti, tetapi pada kualitas kebijakan dan pengelolaan PT yang kurang kondusif. Tatakelola PT di Indonesia bukan hanya jauh tertinggal dari Amerika Serikat atau Eropah, tetapi juga dari beberapa negara Asia, seperti China, Malaysia, atau Thailand yang telah lama mengelola pendidikan tinggi melalui pendekatan korporatif untuk efisiensi. Oleh karena itu, korporatisasi tatakelola PT (baca: PTN-bh) adalah sebuah keniscayaan.

Melalui korporatisasi manajemen universitas, banyak negara maju yang mampu menempatkan universitas mereka pada papan atas dunia. Universitas mereka memiliki derajat otonomi yang tinggi, dengan intervensi yang sangat minimal dari pemerintah. Universitas negeri di Amerika Serikat, Australia dan Eropa telah lama beroperasi sebagai *corporate-like institutions* untuk memacu profesionalitas dosen, peneliti dan pengelola; memperkuat hubungan industri; serta meningkatkan daya saing secara global.

## DAFTAR RUJUKAN

- BPS (beberapa tahun). *Survey angkatan kerja nasional*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia.
- Day, J.C. & Newburger, E.C. (2002). The Big Payoff: Educational Attainment and Synthetic Estimates of Work-Life Earnings. Special Studies. *Current population reports*. Washington DC. Economics and Statistics Administration.
- Edwards, C. (2004). Downsizing the Federal Government. *Policy Analysis*. No. 515. June 2.
- Edwards, C. & McCluskey, N. (2019). Higher education subsidies. *The US*. Cato Institute, 1000 Massachusetts Avenue Washington D.C. 20001-5403.
- IMD (2022). The 2022 IMD world competitiveness ranking. Diakses tanggal 21 Januari 2022 dari: [file:///C:/Users/hp/Downloads/WCY\\_Ranking2022.pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/WCY_Ranking2022.pdf)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). APBN Kita Kinerja dan Fakta 2022. Desember 2022. Diakses 18 Januari 2023 dari: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/1a28b5ae-91df-44f0-8e40-5e21056a974e/V-1-Final-Publikasi-APBN-KiTa-Edisi-Januari-2023.pdf?ext=.pdf>
- Maneejuk, P. & Yamaka, W. (2021). The Impact of higher education on economic growth in ASEAN-5 Countries. In *Sustainability*, Published 7 January 2021 DOI:10.3390/SU13020520; Corpus ID: 234166071

- McCluskey, N. and Edwards, C. (2019). "Higher education subsidies" in *Downsizing the federal government*, Cato Institute, 1000 Massachusetts Avenue N.W. Washington D.C. 20001-5403
- MOHE (2016). "*National priorities: Recent trends & future developments in Malaysia.*" Institute of International Education, Ministry of Higher Education Malaysia
- Oberman, R., Dobbs, R., Budoiman, A., Thompson, F. and Rosse, M. (2012). *The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potentials*. Washington, DC: MCKinsey Global Institute.
- OECD (2012). Program for International Student Assessment Results 2012" diunduh pada tanggal 10 Mei 2014, melalui web: <http://www.oecd.org/pisa>
- OECD (2016). PISA 2015 Results (Volume I); *Excellence and Equity in Education*. Published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. Diakses 20 Juli 2021: <https://www.oecd.org/education/pisa-2015-results-volume-i-9789264266490-en.htm>
- OECD (2018). PISA 2018 results combined executive summaries volume I, II & III published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. Diakses 30 Juli 2021, dari: [file:///C:/Users/hp/Documents/File%20aktif%202020/UPI2020/Karya%20Staf%20Ahli%20UPI/Katalis-2021/Combined\\_Executive\\_Summaries\\_PISA\\_2018.pdf](file:///C:/Users/hp/Documents/File%20aktif%202020/UPI2020/Karya%20Staf%20Ahli%20UPI/Katalis-2021/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf)
- Pisani, E. (2013). Indonesian kids don't know how stupid they are. (2013), Diakses tanggal 20 Mei 2018, dari: <http://Portraitindonesia.com/indonesian-kids-dont-know-how-stupid-they-are/>
- Sala-I-Martín, X. (ed.) (2013). *The global competitiveness index 2012–2013: Strengthening recovery by raising productivity*. Geneva: The World Economic Forum
- Schultz, P.T. (2004). Evidence of returns to schooling in Africa from household surveys: Monitoring and restructuring the market for education. *Journal of African Economies* 13(2), 95-148.
- Schwab, K. (2016). "*The global competitiveness report; Insight report 2015-2016*" Geneva, Copyright © 2015 by the World Economic Forum; ISBN-13: 978-92-95044-99-9; ISBN-10: 92-95044-99-1
- Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. (2021). Statistik Pendidikan Tinggi 2020. Jilid lima, Desember 2020. Diakses 18 Januari 2023, dari: <https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%202020.pdf>
- The World Bank. (2019). *The Promise of Education in Indonesia*. Diakses pada 18 Januari 2023, dari: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/968281574095251918/pdf/Overview.pdf>
- UMM (2013). Universitas Muhamadiyah Malang: From Muhamadiyah for the Nation. Website of University of Muhamadiyah Malang East Java, Latest Update: 15 June 2013.

- Rosyidi, U. (2018). Managing corporate higher education: The Indonesia's greatest challenge. *The New Education Review*, 3 (33), 39-48
- Web-metrics (2016). *Webometrics Indonesia University Ranking, July 2016 Edition*, (<http://www.webometrics.info/en/Asia/indonesia>); Jakarta, Ministry of Research, Technology and Higher Education Indonesia
- Web-metrics (2021). *Webometrics Indonesia University Ranking, July 2021 Edition*, (<https://www.webometrics.info/en/asia/indonesia%20>)
- Weisbrod, B. A., Ballou, J.P. & Asch, E.D. (2008). "*Mission and money; Understanding the university.*" Cambridge University Press, September 2009. ISBN: 9780521515108